

## **BAB IV**

### **ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MENGELUARKAN KEBIJAKAN BEBAS VISA BAGI WISATAWAN TIONGKOK PADA TAHUN 2016**

Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan pembuktian hipotesa. Penulis akan menjelaskan secara mendalam dan faktual mengenai alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bebas visa khususnya di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2016. Selain itu, penulis akan menganalisa untung rugi yang didapatkan dari dilahirkannya kebijakan tentang pembebasan visa bagi 169 negara di dunia pada tahun 2016.

#### **A. Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Tiongkok**

##### **1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Asal Tiongkok**

Salah satu alasan utama yang mendasari terbitnya Perpres No 21 Tahun 2016 adalah adanya kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu objek vital dalam membangun Indonesia. Hal ini didasari oleh keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia disertai dengan keanekaragaman budaya, etnik, bahasa, kuliner kerajinan tangan merupakan fondasi membangun Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Mengapa dikatakan kreatif sebab hal ini berkaitan dengan inovasi yang di ciptakan oleh sejumlah daerah untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Dalam arti bahwa hal ini berkaitan dengan tingkat kreatifitas dalam memanfaatkan budaya,

kuliner, kondisi geografi daerah dan bidang lainnya sebagai objek daya tarik wisatawan mancanegara. Hal inilah yang mendasari bahwa pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang strategis dalam fondasi ekonomi Indonesia, sebab sudah bisa dipastikan bahwa ketika wisatawan asing berkunjung ke Indonesia akan pula menikmati ekonomi kreatif ainya seperti kuliner, kerajinan, tarian dan lain-lain yang awalnya datang untuk berkunjung di daerah tersebut.<sup>57</sup>

Saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih belum terlalu banyak dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2013, wisatawan mancanegara mencapai 8,80 juta sementara pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 9,43 juta wisatawan. Hal ini berbeda dengan Malaysia misalnya, yang telah membebaskan visa bagi 164 negara dan telah terbukti mampu meningkatkan kedatangan wisatawan asing hingga 27 juta orang setahun pada tahun 2014. Sementara itu, Thailand yang telah membebaskan visa bagi 56 negara telah mampu mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 24,77 juta orang setahun pada tahun 2014.<sup>58</sup>

Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini bersifat resiprokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-

---

<sup>57</sup> Laode Muhamad Fathun, Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 16, No 2, Tahun 2017. Hal 95.

<sup>58</sup> Yuni Sudarwati, Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, *Jurnal P3DI DPR RI*, Vol. VII, No. 06, Tahun 2015, Hal. 14.

negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara itu, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa. Indonesia berharap bahwa dari terobosan kebijakan ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah pendapatan di sektor pariwisata. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan ini akan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Kebijakan ini juga didukung dengan terjadinya depresiasi rupiah terhadap USD. Kondisi ini secara tidak langsung membuka keran bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Tingginya nilai tukar USD membuat biaya perjalanan dan akomodasi bagi wisatawan mancanegara akan menjadi murah di Indonesia. Proyeksi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini diharapkan akan mampu mengumpulkan devisa USD di Indonesia yang selanjutnya diharapkan akan dapat menekan lemahnya rupiah.<sup>59</sup>

Setelah satu kuartal berjalan, pemerintah mulai merasakan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BVK ini. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat bertambah. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa dalam 4 bulan pertama setelah diberlakukan bebas visa, kunjungan wisman meningkat sebanyak 4,27 persen dengan jumlah kunjungan dari negara penerima BVK meningkat 15 persen dibanding 2014. Dengan capaian ini, maka kebijakan BVK dinilai akan semakin

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

mendorong kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya pencapaian target yang dicanangkan Kementerian Pariwisata yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dengan penerimaan devisa sebesar 20 juta dolar AS pada tahun 2019.<sup>60</sup>

## **2. Meningkatkan Kunjungan Investor Asal Tiongkok**

Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, alasan utama lainnya yang mendasari terbitnya Perpres No 21 Tahun 2016 adalah untuk mempermudah kedatangan investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Mendatangkan investor merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Munculnya kebijakan bebas visa asing (BVK) adalah instrumen respon kebijakan nasional di pemerintahan Jokowi berupa memberikan bebas visa kunjungan kepada sejumlah negara. Hal ini dilakukan untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan asing masuk ke Indonesia. Selain wisatawan, Pemerintah juga mengharapkan kunjungan investor untuk melihat peluang berbisnis di Indonesia dengan melakukan investasi. Kebijakan strategis ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk

---

<sup>60</sup> Repository UGM dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/115516/potongan/S1-2017-348821-Introduction.pdf>  
Diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 18.55 WIB.

menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu fondasi ekonomi nasional atau ekowisata. Upaya tersebut mulai di terbitkan Kepres tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang disempurnakan dengan Kepres tentang Bebas Visa Kunjungan.<sup>61</sup>

Sebagaimana program nawacita Presiden Joko Widodo salah satunya yaitu melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka membangun perekonomian bangsa. Maka hal pertama yang harus dipersiapkan oleh pemerintah adalah dari segi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga, Pemerintah melihat bahwa tercukupinya anggaran hanya bisa dilakukan dengan mengundang investor.

Jelas bahwa kebijakan bebas visa tidak hanya akan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, tetapi juga akan mendorong datangnya investor-investor untuk melihat iklim investasi di Indonesia. Diharapkan, semakin banyak investor berkunjung maka semakin cepat proses investasi itu dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan bebas visa tidak semata untuk menarik minat wisatawan, tetapi juga untuk menarik minat investor untuk berkunjung ke Indonesia.

---

<sup>61</sup> Laode Muhamad Fathun, Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Volume 16, No 2, Tahun 2017. Hal 96.

## **B. Keuntungan Ekonomi Dibalik Kebijakan Bebas Visa Indonesia**

Berbicara mengenai keuntungan ekonomi, maka pemberian bebas visa terhadap 169 negara yang ada di dunia merupakan salah satu faktor yang akan mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Dengan adanya kebijakan bebas visa itu, Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dollar.<sup>62</sup> Kebijakan bebas visa merupakan salah satu cara termudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menggenjot devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata dan diharapkan dapat memperbaiki kinerja neraca jasa.<sup>63</sup>

Kunjungan Wisatawan ke Indonesia masih dikalahkan oleh Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kondisi tersebut menjadi ironis mengingat tujuan wisata Indonesia lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini berdampak pada kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya mencapai 9 persen pada tahun 2013. Sementara itu, di Thailand kontribusinya mencapai 20 persen dan di Malaysia mencapai 16 persen.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ahmad Jazuli, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, No.3, Tahun 2016. Hal. 212.

<sup>63</sup> Yuni Sudarwati, Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Jurnal P3DI DPR RI, Vol. VII, No. 06, Tahun 2015, Hal. 13.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Dengan adanya kebijakan BVK, Indonesia menutup tahun 2015 dengan pencapaian 10.406.759 wisatawan mancanegara. Dari pencapaian tersebut, diperoleh devisa negara sebesar 11,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 163 triliun dengan perhitungan rata – rata lama tinggal (length of stay) 8,5 hari dan rata–rata pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) sebanyak 1.190 dolar AS per wisatawan per kunjungan. Pencapaian ini secara keseluruhan terangkum dalam angka pertumbuhan pariwisata nasional sebesar 7,2 persen, melampaui capaian ASEAN dan global masing–masing 6 persen dan 4,4 persen. Di tingkat ASEAN Indonesia hanya kalah oleh Thailand yang melesat di angka 23 persen.<sup>65</sup>

Berlakunya implementasi BVK merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menginternasionalisasi kepentingan pariwisata Indonesia di dunia internasional. Peluang tersebut dengan strategi memberikan akses khusus kepada 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia. Target utamanya adalah menarik sebanyak mungkin wisatawan asing yang kondisi tersebut bisa berpengaruh pada akses pendapatan nasional.<sup>66</sup>

Data dari UNWTO menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan devisa dari pariwisata dari tahun 2015-2016, yakni dari 10.761 juta dolar mencapai 11.349 juta dolar. Jika dirupiahkan (dengan kurs 1 dollar = 13.338

---

<sup>65</sup> Repository UGM dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/115516/potongan/S1-2017-348821-Introduction.pdf> Diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 18.55 WIB.

<sup>66</sup> Laode Muhamad Fathun, Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Volume 16, No 2, Tahun 2017. Hal 109.

rupiah), jumlahnya masing-masing mencapai Rp. 143 Triliun dan Rp. 151 Triliun. Peningkatan kunjungan wisatawan dan penerimaan devisa tidak hanya bergantung pada kebijakan bebas visa. Promosi pariwisata dan harga akomodasi juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah wisatawan dan penerimaan devisa.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Artikel dalam

<https://www.kompasiana.com/andiwrpratama/5a38ec8bc7db6a4120cf33/perlunya-evaluasi-bebas-visa?page=all> diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 5.44 WIB.